



Questions & Answers
ITB-UNDP-PETRA-92267-004-2020

Assignment Name:

Procurement of Works: Construction of Two Landfills and Supporting Facilities in Central Sulawesi

TO ALL INTERESTED BIDDERS

- Q: Referring to the requirement “Minimum 2 contracts of at least of USD 1,500,000 or similar nature and complexity implemented over the last 7 years”, could the minimum 2 contracts of at least USD 1,500,000 be represented by only one of Joint Venture (JV) members? Or, for instance, the JV member A has a contract of USD 500,000 and JV member B has a contract of USD 2,500,000, would the accumulation of both contracts be acceptable as compliant to the requirement?

Mengacu pada persyaratan “Minimum 2 kontrak dengan nilai minimum USD 1.500.000 atau dengan jenis pekerjaan yang sama dan dengan kompleksitas yang sama dalam 7 tahun terakhir”, apakah diperbolehkan untuk minimum 2 kontrak senilai minimum USD 1,500,000 tersebut bisa diwakilkan oleh salah satu member Joint Venture (JV)? Atau, misalnya, member A memiliki kontrak dengan nilai USD 500.000 dan member B memiliki kontrak dengan nilai USD 2.500.000, apakah akumulasi dari dua kontrak tersebut dapat diterima sebagai memenuhi persyaratan?

- A: Companies in Joint Venture (JV) can submit either minimum 2 contracts at least of USD 1,500,000 in construction OR minimum 2 contracts with similar nature and complexity (i.e. construction of landfill) from one of JV members or combination between members. The number of contracts shall be minimum 2 contracts. Therefore, in a case that a bidder submit a contract with value of USD 500.000 (Company A) and another contract with value of USD 2.500.000 (Company B), it will be considered that the JV members (the bidder) only submit 1 (one) contract only, hence not compliant to the requirement of minimum 2 contracts of similar value.

Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Joint Venture (JV) dapat mengumpulkan minimum 2 kontrak dengan nilai minimum USD 1.500.000 dalam pekerjaan konstruksi ATAU paling sedikit 2 kontrak dengan jenis dan kompleksitas pekerjaan yang sama (misal dalam konstruksi TPA) dari salah satu anggota JV atau kombinasi di antaranya. Jumlah kontrak yang diminta paling sedikit adalah 2 kontrak. Jadi, dalam contoh di mana bidder mengumpulkan satu kontrak dengan nilai USD 500.000 (Perusahaan A) dan satu kontrak lainnya dengan nilai USD 2.500.000 (Perusahaan B), hal ini akan diberlakukan bahwa bidder tersebut (JV) hanya 1 (satu) kontrak saja yang dapat diterima, sehingga tidak memenuhi persyaratan minimum 2 kontrak dengan nilai yang sama.

Q: Regarding the format of Bid Security, are the bidders allowed to use the standard format used and issued by the bank, since certain banks in Indonesia require references to the Section 1831 and Section 1832 of the Indonesian Civil Law (Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1831 dan 1832) that regulate the relinquishment of special right of claim on asset belonging to the Obligee and for the seizure and sale of such asset for the discharge of the Obligee's debt?

Mengenai format dari Jaminan Penawaran, apakah peserta tender boleh menggunakan format yang dikeluarkan oleh Bank, dikarenakan beberapa Bank di Indonesia mengacu kepada Pasal 1831 dan 1832 KUHP yang mengatur tentang penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada piutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya?

A: UNDP encourage bidders to use or propose to the bank to use the standard format of Bid Security issued by UNDP, in which the content is already provided specifically to meet the requirement of ITB. UNDP's standard format of Bid Security has been accepted by most banks in Indonesia. As alternative to the Bid Security form, bidders may also submit a bank-issued Check.

UNDP as an integral part of the United Nations is not subject to any national law and jurisdiction. UNDP allows references to the Section 1831 and Section 1832 of the Indonesian Civil Law (Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1831 dan 1832) that regulate the relinquishment of special right of claim on asset belonging to the Obligee and for the seizure and sale of such asset for the discharge of the Obligee's debt. But, UNDP cannot accept a reference to Indonesian Civil Law for any claim or dispute. Settlement of Disputes is indicated by UNDP in the Annex 9 – General Conditions of Contract for Civil Works, Article 71 that bidders shall refer and accept in their bid submission.

UNDP menyarankan peserta tender untuk menggunakan atau mengusulkan kepada bank untuk menggunakan format standar Jaminan Penawaran yang dikeluarkan oleh UNDP, yang isinya sudah disediakan secara khusus untuk memenuhi persyaratan ITB. Format standar UNDP tentang Jaminan Penawaran telah diterima oleh sebagian besar bank di Indonesia. Sebagai alternatif dari formulir Jaminan Penawaran, peserta tender juga dapat menyerahkan Cek yang diterbitkan bank.

UNDP sebagai bagian integral dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak tunduk pada hukum dan yurisdiksi nasional mana pun. UNDP mengizinkan referensi ke Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1831 dan 1832 yang mengatur pelepasan hak khusus atas klaim atas aset milik Penanggung dan untuk penyitaan dan penjualan aset tersebut untuk pelepasan hutang. Namun, UNDP tidak dapat menerima referensi Hukum Perdata Indonesia untuk klaim atau sengketa apa pun. Penyelesaian Perselisihan ditunjukkan oleh UNDP dalam Lampiran 9 - Ketentuan Umum Kontrak Pekerjaan Sipil, Pasal 71 yang harus dirujuk dan diterima oleh peserta tender dalam pengajuan penawaran mereka.

Q: How many months are the validity of Bid Security?
Berapa bulan Jaminan Penawaran harus valid/absah?

A: The validity of bid security shall be 150 days. The valid date starts on the closing date of bid submission.

Jaminan Penawaran harus valid/absah selama 150 hari, terhitung dari hari penutupan pengumpulan penawaran.

- Q: Does UNDP accept a bid security issued by an Insurance Company?
Apakah UNDP menerima Jaminan Penawaran yang dikeluarkan perusahaan asuransi?
- A: UNDP does not accept a bid security issued by an Insurance company.
UNDP tidak menerima Jaminan Penawaran dari perusahaan asuransi.
- Q: Related to the requirement of Audited Financial Statement during the last three years (2017-2018-2019), would an unaudited financial statement be disqualified?
Terkait perihal persyaratan laporan keuangan dalam 3 tahun terakhir yang diaudit, apakah menggugurkan apabila terdapat laporan keuangan yang belum diaudit?
- A: Please refer to Form D: Eligibility and Qualification Form, section Financial Standing in the ITB. It is required that the Financial statements must be audited by a certified public accountant and the financial statements must correspond to accounting periods already completed and audited. No statements for partial periods shall be accepted.
Mohon mengacu pada "Form D: Eligibility and Qualification Form", bagian "Financial Standing" dalam ITB. Disyaratkan bahwa Laporan Keuangan harus diaudit oleh akuntan publik yang tersertifikasi dan laporan keuangan tersebut harus merepresentasikan periode akuntansi yang telah selesai dan teraudit. Laporan keuangan yang parsial secara periode, atau tidak merepresentasikan periode yang diminta dalam ITB, tidak dapat diterima.

Jakarta, 20 September 2020